

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Terdapat beberapa alasan penulis memilih “*Upaya Perdamaian Korea Selatan dan Korea Utara Melalui Deklarasi Panmunjom Era Presiden Kim Jong Un.*” Sebagai pilihan judul. Pertama, dikarenakan penulis mengambil diplomasi sebagai pilihan konsentrasinya. Sehingga, penulis ingin mengkaji topik ini yang masih berkaitan dengan isu *High Politics*. Kedua, mengesampingkan fakta diatas, penulis memiliki ketertarikan tersendiri terhadap topik yang akan dikaji. Seperti alasan terpecahnya Korea menjadi dua yaitu Korea Selatan dan Korea Utara yang menjadikan kehidupan di kedua negara tersebut menjadi bertolak belakang. Korea Selatan dengan negaranya yang sudah maju mengikuti perkembangan jaman dan Korea Utara yang menutup akses dari dan menuju ke negaranya. Penulis juga tertarik kepada alasan mengapa reunifikasi kedua negara ini tidak dapat tercapai sampai saat ini yang pastinya terdapat campur tangan dari pihak ketiga didalamnya.

B. Latar Belakang Masalah

Pasca terlepasnya Korea dari penjajahan Jepang tahun 1945 yang mana mengakibatkan Korea terbagi menjadi dua yaitu Korea Selatan dan Korea Utara, telah banyak aksi provokatif yang dilakukan oleh pihak Korea Utara sepanjang tahun 1953 hingga hari ini. Dimulai dari upaya pembunuhan terhadap pemimpin Korea Selatan, terror bom, penculikan warga sipil, provokasi militer di wilayah perbatasan, uji coba misil hingga program pengembangan senjata nuklir. Berikut tercatat beberapa tindakan provokatif yang dilakukan oleh Korea Utara seperti diantaranya; percobaan pembunuhan presiden Park Chung Hee (21 Januari 1968),

pemboman di Burma (Vietnam) yang membunuh empat menteri dan 16 warga Korea Selatan (9 oktober 1983), pengeboman pesawat (South Korea Airline) yang membunuh 115 warga sipil (29 November 1987), pertempuran Yeopyeong (1999 dan 2002), percobaan nuklir (Oktober 2006) dan sebagainya. (Sudirman, 2018)

Berbagai upaya telah dilakukan oleh kedua belah pihak untuk diadakannya perdamaian dan reunifikasi sejak awal terbaginya Korea menjadi dua, hingga saat ini yang mana belum sepenuhnya terealisasi. Selain ancaman yang saling dilontarkan baik dari pihak Korea Selatan maupun Korea Utara, dampak lain dari perpecahan kedua negara ini adalah banyak warga sipil yang terpisah dari keluarganya.

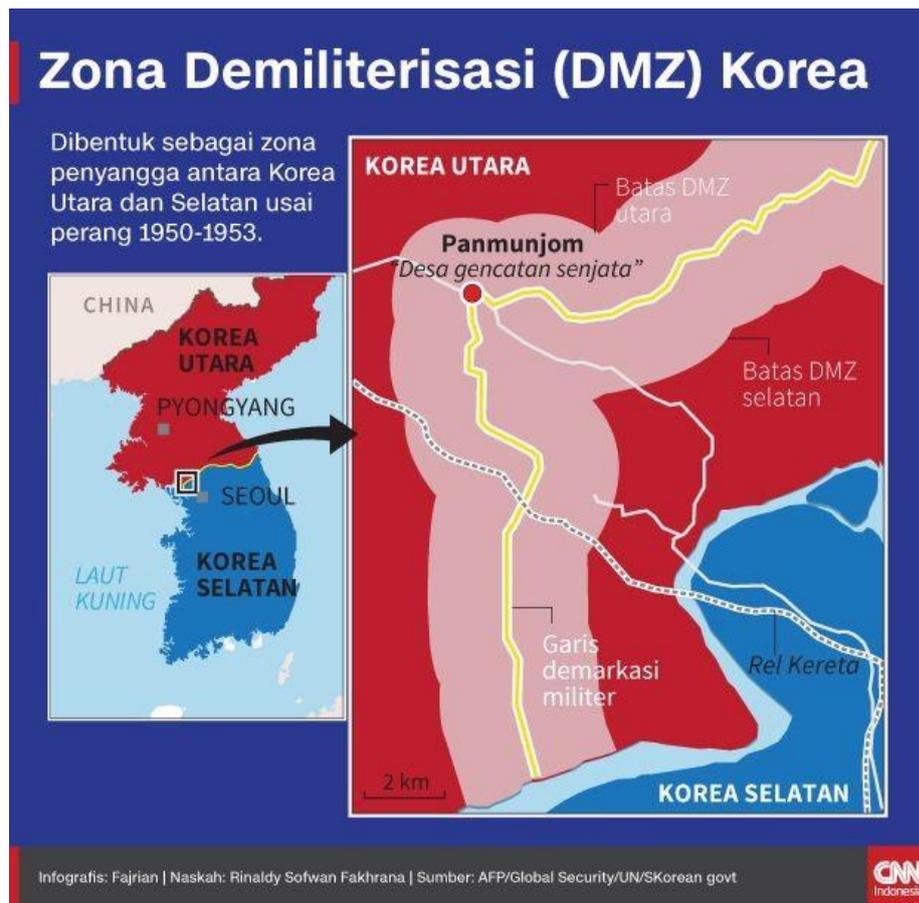
Pada tahun 1990-an, Korea Selatan dan Korea Utara mulai mencoba untuk membangun kembali hubungan mereka yang dibuktikan dengan penandatanganan “Agreement on Reconciliation, Non-aggression and Exchanges and Co-operation” dan deklarasi bersama untuk melakukan denuklirisasi. (Korea-Dpr.com, 2011)

Pada tahun 1998, pihak Korea Selatan mengeluarkan kebijakan yang terkenal dan menjadi salah satu langkah penting dalam upaya reunifikasi yakni “Sunshine Policy.” Yang dikeluarkan oleh Presiden Korea Selatan pada saat itu, Kim Dae Jung. Terdapat pula beberapa kebijakan yang ikut dikeluarkan oleh Presiden Korea Utara, Kim Il Sung sebagai bentuk dari upaya perdamaian yaitu tiga prinsip reunifikasi yang menjadi inti dari North-South Joint Statement. Lalu pada tahun 1993, Kim Il Sung kembali mengeluarkan 10 program untuk mengupayakan reunifikasi Korea. (Korea-DPR.com, 2003)

Kepemimpinan Kim Il Sung kemudian dilanjutkan oleh Kim Jong Il dan pada tahun 1994, Korea Selatan dan Korea Utara menunjukkan perubahan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan kedua belah pihak yang sama-sama kooperatif dan menjalankan kebijakannya. Terlebih lagi saat Presiden Korea Selatan Kim Dae Jung berhasil menetapkan

“Sunshine Policy,” Kim Jong Il selaku Presiden Korea Utara sangat kooperatif dan menerapkan kebijakan tersebut yang membuat Korea Utara menjadi lebih terbuka secara internasional. Selain itu, semenjak Kim Jong Il menjabat, kedua belah pihak sering melakukan pertemuan antar negara meskipun tidak sepenuhnya berdamai, namun ketegangan antar negara ini mereda. (Hong, 2017)

Saat Kim Jong Un menjabat menjadi Presiden, ia meneruskan upaya perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara seperti yang telah dilakukan oleh ayah sekaligus pendahulunya, Kim Jong Il melalui deklarasi perdamaian Panmunjom yang kemudian di tanda tangani oleh kedua belah pihak pada 27 April 2018. Beberapa poin penting dari deklarasi ini termasuk diantaranya upaya denuklirisasi Korea Utara, rezim damai dimana kedua negara ini setuju untuk meningkatkan hubungan bilateral, mempertemukan keluarga yang terpisah akibat terpecahnya Korea, hingga bergabung dalam event olahraga. (Kartini, 2018)



Gambar 1.1 Peta Tempat Terjadinya Deklarasi Panmunjom

(Santi, 2018)

Deklarasi Panmunjom ini juga menjadi salah satu langkah besar yang dilakukan oleh Korea Utara untuk melakukan perdamaian dengan Korea Selatan. Namun, tercatat telah ada beberapa tindakan dari pihak Korea Utara yang tidak sesuai dengan persetujuan awal. Pada pembahasan Deklarasi Panmunjom, terdapat kesepakatan mengenai peniadaan perang maupun konflik. Tetapi, tidak lama setelah pembahasan deklarasi tersebut, Korea Utara melancarkan ancaman terhadap Korea Selatan. Pihak dari Korea Selatan sudah mengupayakan untuk menyelesaikan konflik ini melalui jalur damai namun selalu ditolak oleh pihak Korea Utara. Hal ini bukan hanya berasal dari keputusan Kim Jong Un namun, terdapat pula peran dari saudari perempuannya yang bernama Kim Yo Jong. (Wareza, 2020)

Terdapat beberapa perbedaan kebijakan yang diambil oleh Kim Jong Un dengan pendahulunya, seperti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pendahulu Kim Jong Un yang dianggap lebih kooperatif dalam membangun hubungan kerjasama dan perdamaian dengan Korea Selatan yang mana, hubungan positif kedua negara ini sempat bertahan selama beberapa tahun. Namun, ketika Kim Jong Un menjabat, kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Korea Utara nampak lebih agresif dan menjadi lebih sulit bagi Korea Utara untuk kooperatif dengan negara lain. Kebijakan yang dikeluarkan ini juga lebih “berani.” dan beberapa kali dinilai lebih “mengancam.” jika dibandingkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pendahulunya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, jika ditarik satu garis lurus akan muncul sebuah pertanyaan yaitu: **Mengapa Kim Jong Un Setuju Untuk Menginisiasi Perdamaian Korea Utara – Korea Selatan?**

D. Kerangka Teori

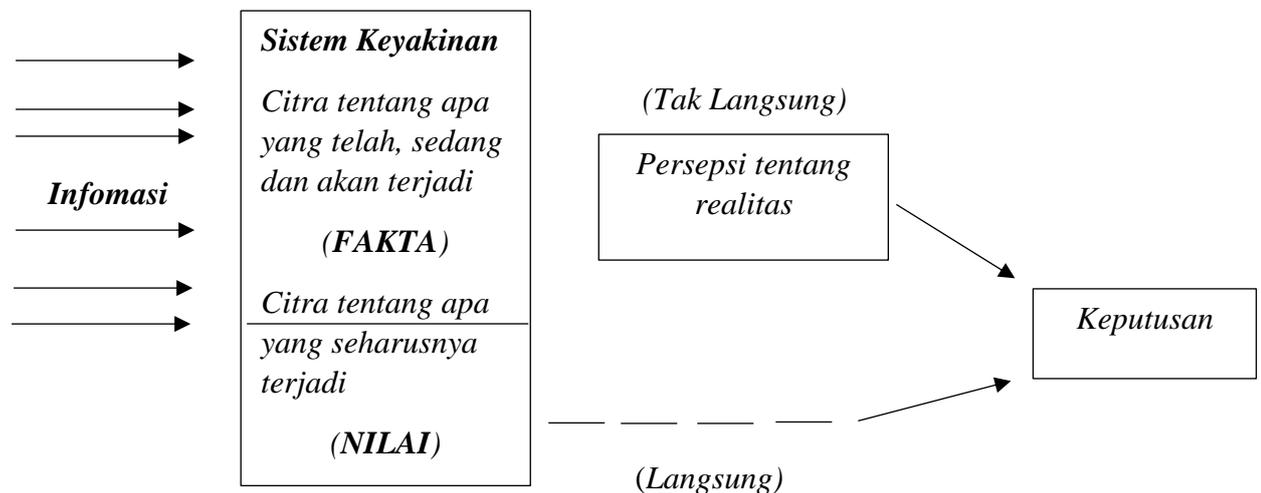
Dalam rangka membantu melakukan analisis dalam penelitian ini maka, diperlukan adanya kerangka teori. Kerangka teori yang akan diambil penulis ini nantinya ditujukan untuk membantu menjawab pertanyaan yang tertera pada rumusan masalah. Untuk itu, penulis akan menggunakan teori persepsi untuk mengetahui tujuan pasti mengapa Kim Jong Un mengubah pandangannya hingga akhirnya ia menginisiasi perdamaian Korea Utara dan Korea Selatan setelah perang Korea berlangsung hingga ketegangan antar dua negara yang sampai saat ini masih terjadi.

Teori Persepsi

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan perihal pengalaman seseorang terhadap suatu benda maupun kejadian yang pernah dialami. Proses pemaknaan yang bersifat psikologis ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan dan lingkungan sosial secara umum. Dalam penjelasan lain dikemukakan bahwa persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman dan cara berpikir serta keadaan perasaan atau minat tiap individu, sehingga persepsi seringkali dianggap bersifat subjektif. (Aini)

Dalam dunia Hubungan Internasional, teori persepsi dikenal sebagai teori yang menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya suatu keputusan atau kebijakan yang didasari oleh persepsi tiap individu yang terkait sebagai pelaku pembuat keputusan. Peranan individu dalam teori ini dijadikan variabel yang menjelaskan tentang fenomena internasional. Di dalam buku Mochtar Mas'oeed yang berjudul Studi Hubungan

Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi, dikatakan bahwa persepsi yang dimiliki setiap individu bersifat dinamis. Hal ini dipengaruhi oleh banyak proses termasuk didalamnya proses psikologi yang membentuk kepribadian yang kemudian mampu mempengaruhi perilaku seseorang (Mas'oe'd, 1998). Dalam Hubungan Internasional, individu yang membuat keputusan negara sedikit banyak dipengaruhi oleh persepsinya dalam hal menentukan tanggapan, perilaku hingga keputusan negaranya dalam situasi tertentu. Walter S Jones mengatakan, persepsi sendiri terbagi atas 3 komponen yang mana terdiri atas nilai, keyakinan dan pengetahuan. Nilai merupakan hal yang dianggap oleh seseorang sebagai sesuatu yang benar maupun salah serta kerterpilihan seseorang terhadap realitas tertentu yang menjadi konsep dari apa yang diinginkannya. Keyakinan merupakan pembenaran atas nilai dan pengetahuan merupakan suatu data atau informasi yang diterima setiap individu secara otodidak maupun dari lingkungan luar (Jones, 1992). Hubungan antara sistem keyakinan, persepsi dan keputusan politik luar negeri dapat dilihat dari bagan 1.1 dibawah ini.



(Holsti R. , 1998)

Dari bagan 1.1 ini, dapat dipahami bahwa terdapat 3 tahapan atau proses yang menggambarkan bahwa suatu kebijakan atau keputusan dapat dihasilkan atas dasar persepsi individu terkait pelaku pembuat kebijakan tersebut. Dalam tahapan pertama, munculnya suatu isu dari sekitar yang dapat berupa informasi yang masuk, yang kemudian disebut juga sebagai “Trigger Event.” Lalu pada tahapan selanjutnya, terdapat upaya untuk mempersepsi stimulus atau citra tersebut. Pada tahapan ini, seseorang akan menggunakan penilaian untuk menyeleksi dan menilai berdasarkan citra atau persepsi mereka. Dan pada tahapan terakhir, terdapat upaya untuk menafsirkan stimulus tersebut menjadi apapun yang dihasilkan dari persepsi sebelumnya, seperti halnya sesuatu yang berupa pengeluaran kebijakan (Harvey, 1996).

Dalam bukunya, Holsti mengatakan bahwa nilai, keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi tindakan rasional seorang pembuat keputusan baik untuk dirinya sendiri maupun negaranya (Holsti K. , 1988). Ada dua macam persepsi yaitu persepsi terbuka dan persepsi tertutup. Persepsi terbuka berarti individu tersebut menerima semua informasi yang ada walaupun hal tersebut bertentangan dengan apa yang ia pegang bahkan, mampu mengubah persepsi atau citra yang dipegang agar sesuai dengan kenyataan. Sebaliknya, persepsi tertutup artinya individu tersebut menolak perubahan bahkan mengabaikan informasi yang ia terima. Hal ini tergantung pada cara individu tersebut dalam mendefinisikan situasi seperti apa yang ia pahami berdasarkan citra atau sistem nilai yang ia miliki. Oleh karenanya, tindakan atas persepsi ini sangat tergantung pada citra dan sistem keyakinan yang dianut dan dipercaya oleh pembuat keputusan. Persepsi dan citra yang terbentuk dalam aktor pembuat keputusan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti ideologi, kepribadian, tingkat dan lingkungan pendidikan, pengalaman di masa lalu, status sosial, potensi antara keuntungan dan kerugian, serta keadaan emosional dalam diri seseorang (Jones, 1992).

Persepsi setiap Presiden tentunya berbeda, tergantung pada isu apa yang tengah dihadapi oleh negaranya. Persepsi yang dimiliki oleh Kim Jong Un terbentuk dari informasi yang ia ketahui bahwasannya Korea Utara bisa saja tersapu habis akibat kebocoran nuklir di Punggye-ri. Hal ini didukung oleh fakta dimana lokasi uji coba nuklir milik Korea Utara telah runtuh sebagian dan mengancam negara yang berbatasan dengannya, Cina (Ratnasari, 2018). Merespon informasi terhadap ancaman kebocoran nuklir ini, Kim Jong Un yakin bahwa hal ini dapat menjadi suatu ancaman terbesar mengingat besarnya dampak yang nantinya akan ditimbulkan, dan menginisiasi perdamaian dengan Korea Selatan sebagai pendekatan agar Korea Utara dapat dibantu dalam masa pemulihan bocornya nuklir ini adalah salah satu cara yang efisien. Munculnya keyakinan yang didukung oleh fakta yang ada tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dimiliki Kim Jong Un. Nilai-nilai yang dimiliki Kim Jong Un berasal dari dua hal yaitu eksternal dan internal. Dari eksternal sendiri, sedikit banyak dipengaruhi oleh pemikiran barat sejak ia bersekolah di luar negeri. Sedangkan untuk internal, berasal dari individu Kim Jong Un sendiri. Dibandingkan dengan pendahulunya, citra yang dimiliki Kim Jong Un sendiri lebih luwes dan cenderung lebih terbuka dan mudah menerima informasi yang ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan efektifitas perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh pihak Korea Utara dan Korea Selatan yang prosentasenya lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan Presiden Korea Utara sebelum Kim Jong Un. Informasi mengenai runtuhnya tempat uji coba nuklir dan kemungkinan bocornya radioaktif yang ditemukan oleh para ilmuwan di Universitas Sains dan Teknologi Cina (USTC) ini dijadikan oleh Kim Jong Un sebagai rujukan valid yang dapat dipertanggung jawabkan kelak. Faktor lain yang mempengaruhi Kim Jong Un muncul dari fakta dimana ia sempat bersekolah di luar negeri, yang artinya ia tinggal di lingkungan sosial multikultural yang mana tidak

semata-mata berkaitan dengan komunisme. Latar belakang ini yang menjadikan Kim Jong Un sebagai sosok yang memiliki citra lebih terbuka dalam merespon setiap informasi yang ada, jika dibandingkan dengan pendahulunya yang menganut komunisme yang sangat kuat, yang membuat mereka menolak untuk terbuka terhadap sesuatu perubahan. Keyakinan yang didasari oleh fakta inilah yang menjadikan Kim Jong Un merubah persepsinya terhadap dunia luar. Upaya perdamaian yang sudah lama diusahakan oleh pendahulunya walaupun gagal juga menjadi faktor pemicu lainnya. Kim Jong Un memiliki persepsi bahwa dari munculnya isu kebocoran nuklir ini termasuk penting dan mendesak yang kemudian memicu dikeluarkannya kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang ditandai dengan adanya deklarasi Panmunjom.

E. Hipotesa

Berdasarkan kerangka teori yang digunakan oleh penulis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditulis diatas maka, penulis dapat menarik sebuah hipotesa sebagai jawaban sementara dari alasan dibalik berubahnya perspektif Kim Jong Un hingga Korea Utara setuju melakukan reunifikasi dengan Korea Selatan yaitu meliputi:

1. Faktor internal yang berupa latar belakang pendidikan Presiden Kim Jong Un yang dipengaruhi oleh gaya pemikiran barat dan faktor eksternal berupa adanya kebocoran nuklir di tempat uji coba nuklir milik Korea Utara.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tujuan sebenarnya Korea Utara ingin melakukan perdamaian dengan Korea Selatan
2. Mengetahui alasan dibalik gagalnya reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan
3. Mengetahui alasan mengapa Kim Jong Un pada akhirnya mengubah cara pandanganya dan berniat untuk berdamai dengan Korea Selatan

G. Metode penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam tulisan ini akan terbagi menjadi:

1. Metode pengumpulan data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kepustakaan (Library Research) untuk mencari dan mengkaji mengenai informasi-informasi yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini. Metode ini akan ditekankan pada pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengkaji dari berbagai sumber seperti literatur buku pustaka, jurnal, makalah ilmiah, majalah, surat kabar harian, berita online, internet, website resmi, blog dan sumber-sumber

lainnya yang sekiranya dinilai akan relevan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Metode analisis data

Penelitian yang ada dalam tulisan ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan analisa yang bersifat deksriptif. Penulis akan melakukan analisis data, mengaitkan serta menerjemahkan peristiwa yang terkait dengan topik bahasan. Sehingga untuk jenis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan data kualitatif deskriptif.

H. Jangkauan Penelitian

Guna membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini agar untuk menghindari semakin melebarnya pembahasan yang akan diteliti, penulis akan melakukan pembatasan jangkauan penelitian mengenai Upaya Perdamaian Korea Utara dan Korea Selatan Melalui Deklarasi Panmunjom Era Presiden Kim Jong Un yaitu selama kurun waktu 2000-2019. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan penulis akan mengambil data dari tahun sebelumnya atau setelahnya jika diperlukan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian yang berjudul “UPAYA PERDAMAIAN KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN MELALUI DEKLARASI PANMUNJOM ERA PRESIDEN KIM JONG UN” ini akan terbagi menjadi lima bab.

Bab I, bab ini memuat pendahuluan penelitian yang terdiri dari alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini akan membahas dinamika upaya perdamaian Korea Utara – Korea Selatan.

Bab III, bab ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inisiasi perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Bab IV, bab ini akan memuat mengenai penutup dan berisikan rangkuman atau kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang tertulis di dalam tulisan ini.

